STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN FIKIH RAMAH DISABILITAS NU PERSPEKTIF MAQASYID Al-SYARIAH

Oleh:
Asyraful Ilmi
NIM: 16421111

Pembimbing:
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN FIQIH RAMAH DISABILITAS NU PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Oleh:
Asyraful Ilmi
NIM: 16421111

Pembimbing:
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Asyraful ilmi
NIM	: 16421111
Program Studi	: Ahwalusyakhsiyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian	: Studi Kritis Terhadap Pemikiran Fiqih Ramah Disabilitas NU Perspektif Maqasid Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tanpa dipaksakan.

Yogyakarta, 30 Juli 2020

Yang menyatakan

Asyraful ilmi

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 16 September 2020
Nama	: ASYRAFUL ILMI
Nomor Mahasiswa	: 16421111
Judul Skripsi	: Studi Kritis terhadap Pemikiran Fiqh Ramah Disabilitas NU Perspektif Maqasid Syariah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Penguji I

Dr. H. Asmuni, MA (.....)

Penguji II

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Pembimbing

Dr. Yusdani, M.Ag

Yogyakarta, 16 September 2020

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Juli 2020 M
9 Dzulhijjah 1441 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di **Yogyakarta**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan petunujuk Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1070/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 M.

Atas tugas kami sebagai pembimbing saudara:

Nama : Asyraful Ilmi
NIM : 16421111
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Ahwalulsyakhsiyah
Tahun : 2019/2020
Skripsi : Studi Kritis Terhadap Pemikiran Fiqih Ramah Disabilitas NU Perspektif Maqasid Syariah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) ekslempar skripsi yang dimaksud.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Dosen Pembimbing,

Dr. Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Asyraful Ilmi

NIM : 16421111

Program Studi : Ahwalulsyakhsiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Penelitian : Studi Kritis Terhadap Pemikiran Fiqih Ramah Disabilitas NU Perspektif Maqasid Syariah

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 30 Juli 2020

Yang menyatakan,

Dr. Yusdani, M.Ag

MOTTO

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th.1987
Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pendahuluan

Penelitian Transliterasi Arab latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaanya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik hasil penelitian itu di bahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), msementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena Ketiadaan pedoman uang baku, yang dapat di pergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia transliterasi Arab latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara Nasioanal.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah di bahas beberapa makalah yang disajikan oleh para Ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab – Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H Sawabi Ihsan,M.A , 2) Ali Audah , 3) Prof.Gazali Dunai , 4) Prof.Dr.H.B.Jassin, dan 5) Drs. Sudarno,M.Ed.

Dalam pidato pengarahan Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena :

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab latin yang baku telah lama di dambakan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak Semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama,dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama ,dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan,sangat memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi Arab latin yang dapat di jadikan acuan dalam penelitian dan pengalih hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda,Usaha penyeragamannya sudah pernah di coba,baik oleh instansi maupun perorangan,namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh,di pakai oleh seluruh umat islam di Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai keseragaman,seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab latin baku yang dikuatkan denagan suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk di gunakan secara Nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.

2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar " satu fenom satu lambang".
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab Latin

Hal-hal yang dirumuskan sacara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab Latin ini meliputi :

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf,dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẑal	ẑ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
◌َ ___	Fathah	A	A
◌ِ ___	Kasrah	I	I
◌ُ ___	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ْيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...ْوَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba
فعَلَ - fa'ala
ذُكِرَ - żukira
يَذْهَبُ - yażhabu
سُئِلَ - su'ila
كَيْفَ - kaifa
هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...َا...ىَ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ىِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...وُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قاَلَ - qāla
رَمىَ - ramā
قِيْلَ - qĭla

4. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

   Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

   Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالُ	- rauḍah al-aṭfāl
	-- rauḍatul aṭfāl
المَدِينَةُ المُنوّرَةُ	- al-Madĭnah al-Munawwarah
	-al-Madĭnatul-Munawwarah
طَلْحَةْ	- talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نزَّلَ	- nazzala
البِرّ	- al-birr
الحَجّ	- al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيْعُ	- al-badĭ'u
الجَلاَلُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	- ta'khużūna
اَلنَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqĭn
	Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān
	Wa auf al-kaila wal mĭzān
إِبرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	Ibrāhĭm al-Khalĭl

	Ibrāhĭmul-Khalĭl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَللهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabĭla.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażĭ bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ	Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur’ānu
	Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubĭn
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubĭn
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamĭn
	Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamĭn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفتْحٌ قَرِيْبٌ	Naṣrun minallāhi wa fathun qarĭb
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعاً	Lillāhi al-amru jamĭ’an
	Lillāhil-amru jamĭ’an
وَاللهَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāha bikulli syai’in ‘alĭm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan,

Untuk kepada Nabi Muhammad yang telah memperantarai agama islam ini kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan manisnya islam,

Untuk keluargaku yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan,

Untuk teman-temanku yang selalu menemaniku dikala suka maupun duka,

Dan untuk semua orang yang telah hadir dalam hidupku,

This is for you!"

ABSTRAK

STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN FIQIH RAMAH DISABILITAS NU PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

ASYRAFUL ILMI

16421111

Fikih ramah disabilitas sebagai salah satu bentuk kepedulian islam terhaadap para penyandang disabilitas. Yang didalamnya islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Maka dari itu Nahdatul Ulama merumuskan fikih disabilitas yang harapannya nanti adanya fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas terutama dalam mendukung hak-hak mereka dalam beribadah dalam mendalami agama, dan juga sudah memiliki UU yaitu No.10 Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab pemerintah juga dalam memfasilitasi kekurangan-kekurangan bagi penyandang disabilitas. Namun, masih banyak para penyandang disabilitas yang tentu memiliki beberapa keterbatasan yang menghambat mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap gagasan fikih ramah disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas telah memenuhi empat perlindungan yang ada dalam Maqasid Syariah yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan.

Upaya untuk mewujudkan kekurangan yang dialami oleh penyandang disabilitas yaitu melakukan segala sesuatu sesuai kemampuan dan menjalani kehidupan dengan penuh semangat sabar dalam menghadapi cobaan, memiliki yang ditanam didalam diri keberanian dan rasa percaya diri, serta senantiasa bersyukur kepada Allah SWT.

Kata kunci : Studi Kasus, Fiqih Disabilitas, NU, Maqasid Syariah.

ABSTRACT

A CRITICAL STUDY OF THE DISABLED-FRIENDLY FIQH OF NU IN MAQASID SYARIAH PERSPECTIVE

ASYRAFUL ILMI
16421111

Disabled-friendly fiqh is a form of care by Islam for people with disabilities, in which Islam is a religion that upholds the values of humanity and provides solutions for harmonious and balanced life of mankind. Therefore, Nahdatul Ulama formulates disabled-friendly fiqh with the hope to provide facilities that are accessible for people with disabilities, particularly to support their rights to worship and practice religious teachings. There is also Law No. 10 of 2016 as a form of government responsibility to facilitate people with disabilities. However, there are still many disabled people whose limitations prevent them from living a normal life.

This study is therefore conducted to identify the Maqasid Syariah perspective of disabled-friendly fiqh. The results show that people with disabilities have met the four protection criteria in Maqasid Syariah, including protection of religion, soul, mind, offspring, and dignity.

The efforts to minimize the limitations experienced by people with disabilities include doing the best according to their ability, living the life to the fullest with enthusiasm and patience to face hardship, having courage and self-confidence, and always feeling grateful to Allah SWT.

Keywords: Disabled-friendly Fiqh, NU, Maqasid Syariah

August 28, 2020
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kesempatan, serta kemudahan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, inspirasi akhlak dan pribadi yang mulia.

Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai karya ilmiah yang sederhana dan membahas Studi Kritis Terhadap Pemikiran Fiqih Ramah Disabilitas NU Perspektif Maqasid Syariah. penulis sadar dalam penyusunan karya ini tidaklah terlepas dari dukungan banyak pihak yang telah membantu, memberikan dukungan moral sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesa yang selalu mens*upport* mahasiswa jurusan dan fakultasnya.
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dra. Sri Haningsih, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah.
6. Dr. Drs. Yusdani, M. Ag selaku Dosen Pmbimbing Penulisan Skripsi ini yang selalu memberikan masukan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Krismono, S.HI., MSI. Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Segenap staff Tata Usaha Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah dan staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik dan Bagian Skripsi yang memudahkan

10. Kepada kedua orang yang paling berjasa di dunia ini bagi penyusun, yaitu kedua orang tua penyusun ayahanda ibunda yang tak kunjung putus dalam menyemangati dan mendoa'akan anaknya hingga berhasil pada tahap akhir studi jenjang strata 1 ini.
11. Teruntuk juga kepada abang dan adikku yang selalu mendoakan dan juga mendukung dalam setiap perjalanan dan penyelesaian penelitian ini.
12. Tak kalah pentingnya pula kepada sahabat- sahabatku yang selalau memeberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penyusun mengucapkan sangat berterima kasih dan Jazakumullah Khayran Kasiran hanya Allah sang pemilik segalanya yang bisa membalas kebaikan antum semua. Penyusun juga sadar dalam penelitian ini tentunya tak luput dari kekurangan yang mana kekurangan itu tentunya datang dari penyusun sendiri. Sehingga kritik dan saran penyusun harapkan untuk bisa diperbaiki kedepannya. Karena tiada manusia yang sempurna, namun yang sempurna yakni Allah SWT semata.

Yogyakararta, 30 Juli 2020

Penyusun,

Asyraful Ilmi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM ..... **i**

HALAMAN SURAT PERNYATAAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN TIM PENGUJI ..... **iv**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **v**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xvii**

ABSTRAK ..... **xvii**

ABSTRACT ..... **xix**

KATA PENGANTAR ..... **xx**

DAFTAR ISI ..... **xxiii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pernyataan Penelitian 5

C. Tujuan dan Manfaat penelitian 6

D. Sistematika Pembahasan 7

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 11

A. Kajian Pustaka 7

B. Kerangka Teori 13

1. Pengertian Disabilitas 15

2. Kategori Disabilitas 17

3. Jenis Disabilitas……..... 19

4. Undang-Undang 20

5. Fikih Disabilitas 22

6. Maqasid Syariah 24

BAB III. METODE PENELITIAN 26

A. Jenis Penelitian 26

B. Pendekatan Penelitian 27

C. Teknik Pengumpulan Data 28

D. Konten Analisis Isi 29

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31

A. Hasil Penelitian 31

1. Hasil Wawancara .....

B. Pembahasan 32

1. Studi Kritis Fikih Ramah Disabilitas NU 32

2. Tinjauan Maqasid Syariah 48

BAB V. PENUTUP 57

A. Kesimpulan 57

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 60

BAB I

A. Latar Belakang

Disabilitas atau disebut juga penyandang cacat, kata cacat dalam kamus bahasa indonesia yang mimiliki beberapa arti, kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna yang terdapat pada benda, badan, bathin, atau akhlak. Tampak jelas istilah cacat memiliki konotasi yang negatif, peyoratif ,dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. persepsi yang muncul dari istilah penyandang cacat adalah kolompok social yang merupakan kelompok serba kekurangan. Persepsi ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi Internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat penyandang cacat dan melindungi serta menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.[1]

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis yaitu *pertama* kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tuna rungu, tunawicara. *Kedua*, kelompok kelainan secara non fisik terdiri dari tunagrahita, autis, dan hiperaktif. *Ketiga*, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

[1] Akhmad Soleh, *Aksesbilitas Penyandang Disabilitas,* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2016), 17-24

Pandangan islam terhadap penyandang disabilitas. Manusia dalam pandangan islam adalah makhluk paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaanya dari pada manusia kecuali Allah SWT. Meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena sudah melekat yang terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤

'' sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya[2] *''*

Problem cara pandang disabilitas. Secara umum, cara pandang terhadap disabilitas di dominasi oleh cara pandang mistis dan cara pandang naïf. Cara pandang mistis adalah cara pandang yang menganggap bahwa disabilitas adalah takdir dari Tuhan. Tuhan yang menentukan apakah seseorang memiliki keterbatasan atau tidak. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah menjalaninya. Sebagian beranggapan bahwa disabilitas adalah aib atau bahkan kutukan. Orang yang memiliki cara pandang akan mereka. Sedangkan cara

[2] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 1115

pandang naïf melihat bahwa disabilitas merupakan akibat dari infeksi penyakit, keturunan, kecelakaan, penuaan. Dengan kata lain disabilitas merupakan fenomena manusiawi, bukan fenomena "*ukhrawi"*

Di kalangan masyrakat masih banyak pemikiran yang buruk bagi penyandang di sabilitas sebagai sesuatu yang salah dan dan merupakan sebuah dosa atau aib. Di dalam lingkungan keluarga masih banyak belum bisa sepenuhnya menerima dan malu akan keaadan keluarga yang menyandang disabilitas. Tanpa mereka sadari tentunya hal seperti ini mengurangi semangat dan percaya diri penyandang disabilitas dalam melanjutkan kehidupan seperti melanjutkan sekolah dan mencari pekerjaan

Meskipun indonesia sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, masih banyak disabilitas yang kurang terfasilitasi, bahkan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan dianggap merepotkan. Padahal, kondisi disabilitas seseorang berdampak pada kemampuan orang tersebut untuk berpartisipasi di tengah masyrakat.

Beberapa hambatan yang sering kali dialami oleh oleh penyandang disabilitas di Indonesia adalah kesulitan dalam mengakses layanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, maupun ketenagakerjaan. Kondisi disabilitas seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan mempertahankan kehidupanya, untuk mengungkap berbagai hal terkait

pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas ini dimulai dengan bagaimana diskriminasi bermula, ragam karakteristik disabilitas yang perlu di ketahui oleh masyrakat, situasi penyandang disabilitas di indonesia. Hingga situasi penyandang disabilitas muslim di Indonesia

Dalam bidang keagaaman, tentu ada hambatan yang harus di hadapi oleh penyandang disabilitas. Hambatan tersebut hanya terbatas pada aspek-aspek lain, seperti terbatasnya ustadz atau tokoh agama dari kalangan disabilitas, hingga majelis taklim ataupun kegiatan keagaaman yang belum ramah disabilitas. Dalam hal ini para penyandang disabilitas dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dan informasi terkait tindak-tanduk ibadah yang perlu para penyandang disabilitas ketahui.Pada bagian ini, bagaimana posisi manusia sebagai makhluk, apa saja hak dan kewajibanya, hingga hukum haramnya stigma dan deskriminasi.[3]

Di antara para pemikir muslim kontemporer yang menaruh concern pada reformasi filsafat hukum islam (Usul al-Fikih) adalah Jasser Auda, yang menggunakan maqasid syariah. Jasser Auda hadir dalam kegilisahan intelektual terkait ketidakberdayaan hukum islam *vis a vis* dengan kemajuan dunia modern untuk mengatasi ketimpangan khazanah keilmuan, menurutnya ini terjadi karena ketidakmampuan para ulama' untuk melahirkan produk hukum baru, yang

[3] Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* : (Cet 1) (Jakarta: LBMNU, 2018) V1

disebabkan oleh ketidakmampuan yang bersifat metedologis. Setelah melakukan penelitian terkait teori maqasid sepanjang sejarah pasca Rasulullah kemudian ia mengajukan teori analisis system dan teori maqasid syariah yang di tempatkan sebagai filsafat hukum islam. Kemudian ia menawarkan konsep fikih modern berdasarkan maqasid syariah, yang di dalamnya menegaskan bahwa islam adalah agama yang menjujung tiggi nilai-nilai kemanusian dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang.[4]

Dalam kehidupan beragama penyandang disabilitas mengalami kekurangan akses dan fasilitas yang beribadah yang sesuai dengan kondisi sesuai dengan kemampuan nya. Maka dari itu NU merumuskan fikih disabilitas yang harapan nya nanti adanya fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas terutama dalam mendukung hak-hak mereka dalam beribadah dalam mendalami agama.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan studi research yang melibatkan pemikiran tentang fikih ramah disabilitas bagi penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan baik di bidang sosial, keagamaan, maupun ketenagakerjaan.dengan mengangkat sebuah judul skripsi tentang *"Studi Kritis Terhadap Pemikiran Fiqh Ramah Disabilitas NU Perspektif Maqasid Syariah"* .

B. Pertanyaan Penelitian

[4] Muhammad Salahudin, " *Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid al-Syariah*, Ulumuna: Jurnal Studi ke Islaman Vol 16, No 1. 105

Berdarkan uraian latar belakang maslah diatas, penyusun mengajukan pokok masalah yaitu:

1. Mengapa NU merumuskan fikih ramah disabilitas?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap gagasan fikih ramah disabilitas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

   a. Untuk mengetahui lebih dalam tentang fikih ramah disibalitas NU persepektif maqasid syari'ah.
   b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari tinjauan maqasid syari'ah terhadap gagasan fikih ramah disibalitas.

2. Manfaat Penelitian

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi penulis, adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

   a. Manfaat teoritis

      Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu bagi pembaca, dan menjadi wawasan tambahan bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (ahwal-syakhsiyah*)* terkait fikih penyandang disabilitas perpektif maqasid syariah.

   b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan pengetahuan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan dapat menambah khazanah kepustakaan Universitas Islam Indonesia serta memberikan informasi kepada mahasiswa dan juga menjadi bahan rujukan bagi peneliti seterusnya tentang pemikiran fikih ramah disabilitas.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah untuk dipahami maka di perlukan sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penulis telah menyusun sistematika tersebut agar menjadi runtut dan mudah di mengerti, penyusun ini telah merumuskan pembahasan penelitian ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang paling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun susunanya, sebagai berikut:

BabI: Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah diadakanya penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar dengan dicari jawabanya, tujuan dan manfaat penelitian serta pemanfaatan alur penulisan dan struktur pembahasan dari awal skripsi sampai akhir.

BabII: Bab ini membuat talaah pustaka untuk menelaah penelitian terdahulu dan memuat keterangan-keterangan dari penelitian dari sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang relevan untuk menjadi acuan dalam penelitian ini.

BabIII: Bab ini membahas metode penelitian,yang penulis gunakan dari segi tiga jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian subyek penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data

BabVI: Bab ini berisi hasil pembahasan, yang mana hasilnya penelitian disesuaikan berdasarkan klarifikasi bahasan seperti pendekatan dan rumusan masalah. Sedangkan pembahasan, masuk dalam klarifikasi penelitian yang telah ada dan kerangka teori yang disusun.

BabV: Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, yaitu jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan pada pendahuluan. Saran-saran yang merupakan rumusan berdasarkan kesimpulan yang berupa rekomendasi, baik untuk peneliti selanjutnya maupun pengguna penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Untuk menyempurnakan penelitian ini penulis melakuakan peninjauan beberapa penelitian terdahulu mengenai Studi Kritis Terhadap Pemikiran Fikih Ramah Disabilitas NU Perspektif maqasid syariah. Penelitian tentang fikih ramah disabilitas ini sebenarnya sudah banyak diteliti oleh para akademisi melalui penelitian lapangan,maupun penjelasan dalam sebuah artikel yang membahas tentang ini. Beberapa judul penelitian yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan di tulis oleh peneliti, diantara lain adalah sebagai berikut.

RR. Putri A. Priamsari (2019) dengan jurnal nya berjudul "*Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas"* yang mengemukakan bahwa bertolak ukur dari sikap dan cara pandang masyrakat, termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum yang masih menggap penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah, di tegaskan pula dengan belum terakomodinya

dengan keterampilanya dan skill khusus, guna mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas sehingga dapat terintegrasi dengan sistem hukum acara peradilan. Perbedan peneliti dengan pembahasan diatas adalah demi mewujudkan hukum berkeadilan bagi penyandang disabilitas penyusun mehami nya dengan cara pemikiran fiqih disabilitas NU terfokus dalam maqasid syariah.[1]

Akhmad Sholeh (2015) dalam penelitianya berjudul "*Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksebilitas Penyandang Disabilitas Dalam System Pendidikan di Indonesia"* penelitian ini membahas seputar system pendidikan yang yang masih kurang pelajar penyandang disabilitas untuk dapat mengaksesfasilitas pembelajaran. Adapun akhmad juga mendeskripsikan pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas dan akseabilitasnya terhadap pendidikan.[2]

Lalu, Penelitian milik M. Syafi'e (2014) dalam penelitianya berjudul "*Islam dan Penyandang Disabilitas",* yang memaparkan tentang masalah yang terjadi pada kalangan penyandang disabilitas netra di situasi perkuliahan. Bahwa pembelajaran inklusif memerlukan media pembelajaran yang bisa memberikan pengalaman yang terbaik bagi mahasiswa penyandang disabilitas netra. Pengalaman yang menyatukan antara teori dan praktik diujudkan dalam

[1] RR. Putri A. Priamsari, *Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,* Jurnal, Masalah – Masalah Hukum, Jilid 48, No 2, April (2019).

[2] Akhmad Sholeh, *Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksebilitas Penyandang Disabilitas Dalam System Pendidikan di Indonesia,* Jurnal Palastren, Vol. 1, No 2, Desember(2015).

bentuk pemberitahuan dengan aksebilitas yang baik untuk dapat terjadi mobilitas bagi para mahasiswa penyandang disabilitas netra.[3]

Khoirul Hadi (2016) penelitian ini yang berjudul "*Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah".* Penelitian menjelaskan bagaimana Hukum Islam mengkaji isu tentang disabilitas dalam konsep fikih. Penelitian ini menggunakan maqasid syariah dalam pembahasannya untuk mencapai kemaslahatan kepada para penyandang disabilitas untuk menciptakan fikih disabilitas yang ramah terhadap para penyandang disabilitas. Istilah yang sesuai dengan inti dari maqasid syariah pada penelitian ini dalam maslahahat, karena penetapan hukum yang senantiasa di gunakan berdasarkan atas maslahat. Maslahat tersebut dibagi tiga jenis. Pertama, maslahah primer yakni secara umum dikenal kaidah lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua, maslahat sekunder, adalah yang memang harus ada untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pernikahan, tranksaksi jual beli, dan semua jenis maslahah. Ketiga, maslahah tersier yaitu kemaslahatan yang ada bentuk adab, akhlak dan adat istiadat.[4]

Dermawan Waruwu, Ni Kentut Jeni Adhi penelitian ini yang berjudul "*Kecemasan Penyandang Disabilitas dalam mencari Pekerjaan di Kawasan Kuta Bali"* penelitian ini menjelaskan penyandang disabilitas banyak yang

[3] M.Syafie, *Pemenuhan Aksebilitas Bagi Penyandang Disabilitas,* Jurnal Inklusi, Vol. 1, No 2, Juli-Desember (2015).

[4] M. Khoirul Hadi "*Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah,* Jurnal Palastren, Vol.9, No 1, Juni (2016).

stress karena kurang di berdayakan oleh pemerintah maupun pengusaha pada kawasan wisata. Kemampuan penyandang disabilitas hampir sama dengan orang normal yang jika di berdayakan secara maksimal. Penyandang disabilitas yang diterima di kawasan kuta kurang sesuai dengan keterampilan dan potensi dirinya. Oleh sebab itu pemerintah maupun penguasaha diharapkan pengusaha agar membuat regulasi yang berpihak pada setiap penyandang disabilitas , sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya[5]

Meta Silvia Novembli, nur azizah "*Bagaimana self-efficacy calon guru siswa dengan disabilitas di sekolah inklusi di DIY",* dalam penelitian ini menjelaskan maka terdapat beberapa saran atau rekomendasi dari penelitian ini, yaitu pertama, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dapat membuat program nasional secara komprehensif yang melibatkan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan bagi calon guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusi. Kedua, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk dapat 1) menekankan integrasi kurikulum tentang pendidikan inklusi dan/atau anak berkebutuhan khusus lebih kepada praktikum dari pada teori, 2) mengembangkan kegiatan rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon guru terkait pendidikan inklusi yang berinteraksi secara

[5] Dermawan Waruwu dan Ni Kentut Jeni Adhi, *Kecemasan Penyandang Disabilitas dalam mencari Pekerjaan di Kawasan Kuta Bali,* jurnal psikologi, Vol.2 , No 2 , 2018.

langsung dengan anak berkebutuhan khusus, 3) membangun kerja sama antar lembaga dan profesional lintas sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam rangka memberikan peluang bagi calon guru untuk mengembangkan solusi inovatif terhadap pendidikan inklusi.[6]

Dita Lestari, Budi Andayani ‘’*Program Pembelejaran Individual: Meningkatkan keterampilan mengancing baju pada anak Disabilitas Intelektual sedang”* dalam penelitian ini menjelaskan bahwa program pembelajaran individual (PPI) dengan menggunakan Metode *Chaining* baik yang *forward* maupun *backward*, dan total *task presentation* efektif untuk diterapkan pada anak dengan disabilitas intelektual sedang dalam hal belajar mengancingkan baju. Pemilihan metode disesuaikan dengan kondisi anak dalam hal ini adalah tingkat awal kemampuan mengancingkan baju. Pemberian *reinforcement* efektif adalah pemberian pujian dan *token economy* berupa pemberian susu. Hal ini meningkatkan semangat dan daya juang siswa untuk terus mencoba belajar mengancingkan baju dengan memberikan pujian serta tepuk tangan, sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan diri pada anak.[7]

[6] Meta Silvia Novembli dan Nur azizah “*Bagaimana self-efficacy calon guru siswa dengan disabilitas di sekolah inklusi di DIY”,* Jurnal Psikologi, Vol. 9,No.1, Juni 2020.

[7] Dita Lestari dan Budi Andayani , *Program Pembelejaran Individual: Meningkatkan keterampilan mengancing baju pada anak Disabilitas Intelektual sedang,* Jurnal Al-Athfal Pendidikan anak, Vol 6, No 1, Juni (2020). 27 - 40

Inayah "*Perlidungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum",* penelitian ini meningkat kesadaran politik bagi penyandang disabilitas melalui sebuah sosialisasi bahwa penyandang disabilitas dalam politik sangat penting karena hak yang sama dengan warga Negara yang lain, pada saat ini partisipasi politik kaun penyandang disabilitas tidak seimbang sehingga di pandang sebagai warga Negara yang tidak memenuhi kriteria tersebut dan menyebabkan stigma dari masyrakat bagi penyandang disabilitas yang memandang dengan sebelah mata belum dapat terhapuskan di dalam masyarakat. Sedangkan terhambatnya penyandang disabilitas untuk memilih karena terbatasnya pengetahuan, karena sarana TPS dan kurangnya kesadaran dari penyandang disabilitas itu sendiri.[8]

Dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas Fikih Ramah Disabilitas yang telah dirumuskan oleh NU dan dari sudut pandang Undang-Undang. Dengan mengangkat sebuah judul skripsi : *Studi Kritis Terhadap Fikih Ramah Disabilitas NU perspektif Maqasid Syari'ah.* Penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini karena fokus penelitian ini lebih kepada penyandang disabilitas yang masih kurang ramah kepada para penyandang disabilitas, dalam pembahasanya peneliti jadikan pembahasan utama adalah menggunakan perspektif maqasid syariah dan undang-undang. Kajian terdahulu yang saya ambil lebih tepatnya

[8] Inayah , *Perlidungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum,* Jurnal hukum, Vol 3, No.2, September 2019.

masih belum di harapkan mampu membantu para penyandang disabilitas untuk memfasilitasi kehidupan sehari-seharinya, maka dari itu penelitian ini diharapkan mampu melengkapi atau memberikan kontribusi kecilterhadap pembahasan tema disabilitas yang telah ada

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[9] penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan kata disabilitas merupakan kata bahasa indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Disabilitas, atau keterbatasan diri, dapat berupa fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa gabungan dari ini.

Penyandang disabilitas ini adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Dengan karakteristik yang berbeda inilah mereka membutuhkan pelayanan khusus agar mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai makhluk di muka bumi.

Pada abad ke 19, masyarakat menggunakan istilah *affiction* (penderitaan). Istilah ini di gunakan masyarakat sebagai asumsi mereka

[9] *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi tahun 2008 (Jakarta: Dapartemen Pendidikan Nasional, Gramedia, 2008), 31.

terhadap penyandang disabilitas. Akan tetapi, masih banyak menimbulkan problem negatif di kalangan penyandang disabilitas. Terminologi disabilitas mempunyai tiga istilah :

a. Impairment adalah hilangnya atau kondisi tidak normal pada aspek psikologi, fisik, atau struktur dan fungsi anatomi tubuh
b. Disability adalah keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk melalukan aktifitas sebagaimana orang pada umumnya.
c. Handicap adalah sebuah ketidakberuntangan pada individu akibat dari kelemahan atau disabilitas yang membatasi dan mencegah individu dalam melakukan peran social dan budaya di masyrakat.[10]

Pada tahun 1980 masyarakat indonesia menyebut penyandang disabilitas sebagai penderita cacat. Namun beberapa aktivis gerakan disabilitas mulai menyuarakan kritik terhadap istilah Penderita cacat. Mereka merasa meskipun mereka memiliki kekurangan fisik bukan berarti hidup mereka penuh dengan penderitaan. Faktanya kehidupan mereka masih bisa tertawa, bahagia, gembira, sebagaimana dengan orang biasanya yang tidak mengalami keterbatasan fisik. Mereka juga masih bisa melakukan hal-hal yang sama seperti manusia pada umumnya meskipun menggunakan alat bantu.[11]

[10] Lembaga Bahtsul Masail PBNU, "*Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas", cet 1* (Jakarta, LBMNU, 2018), 16.

[11] *Ibid., 17*

Setelah mendapatkan kritik dari aktivis gerakan disabilitas pemerintah segara mengambil tindakan untuk memperbaiki istilah tersebut. Dengan mengubah kata "*penderit"* menjadi *"penyandang"*. Dan kata "cacat" pun masih belum bisa di terima para aktivis gerakan disabilitas karena masih beluam dianggap adil dan di pandang kurang baik bagi individu memiliki keterbatasan fisik.

Menyingkapi hal tersebut, aktivis gerakan disabilitas dan 60 orang yang mewakili mendesak pemerintah republik indonesia untuk menggantikan nama tersebut. Pada akhirnya, Pada bulan maret 2010 kementrian social menyepakati untuk menggunakan istilah "penyandang cacat " menjadi "peyandang disabilitas" kata tersebut diambil istilah yang resmi oleh dokumen internasional disability dan selanjutnya dikuatkan dengan di terbitnya UU NO. 19 Tahun 2011 tentang Rativikasi Konvesi Internasional Hak Penyandang Disabilitas.[12]

2. Kategori Disabilitas

Secara umum Disabilitas di bagi menjadi tiga kategori yaitu :

a. Kategori Disabilitas berat, disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan sendiri, dengan kata lain mereka bergantung kepada orang lain. Para penyandang disabilitas berat dikategorikan sebagai disabilitas

[12] *Ibid., 19*

mampu rawat, mereka biasanya mengalami *Celebral plasy* (CP), dan mengalami disabilitas ganda *intelektual disability* dan CP. Namun jika penyandang disabilitas ini mengalami disabilitas intelektual makan IQ mereka di bawah 30. Sehingga mereka hanya dapat berbaring di kasur atau hanya duduk di kursi roda. Untuk melakukan kegiatan makan, mandi, buang air kecil maupun air besar, mengenakan pakaian, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya mereka sangat bergatung kepada orang lain.

b. Kategori disabilitas sedang, adalah penyandang disabilitas yang masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari, baik itu merawat diri sendiri, seperti mandi, makan, mengganti pakaian, dan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain dengan sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual yang IQ antara 30-50. Penyandang disabilitas sedang ini masih bisa dilatih untuk aktivitas keterampilan motoric. Contohnya : membuat kerajinan tangan, membersihkan lingkungan yang berbasis ringan, mencuci piring. Sehingga penyandang disabilitas sedang ini dikategorikan sebagai disabilitas mampu latih.

c. Disabilitas ringan, adalah penyandang disabilitas yang masih mampu hidup secara mandiri, sebagian dari mereka mengalami

disabilitasvintelektualdengan IQ lebih dari 70, sehingga mereka sebagai penyandang yang mampu didik.[13]

3. Jenis – Jenis Disabilitas

Jenis disabilitas atau ragam disabilitas sangat banyak dan luas, dari ketiga kategori disabilitas si atas sudah mencakup semua jenis disabilitas. penyandang disabilitas, maka jenis penyandang disabilitas dibagi menjadi empat jenis : penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik.

1) Penyandang disabilitas Fisik, atau disebut dengan kelainan tubuh (Tuna Daksa). Tuna Daksa yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan lahir, sakit, atau kecelakaan (hilang organ tubuh, patah tulang, dan Lumpuh).[14]

   Tuna Daksa adalah mereka yang tidak mampu untuk menggunakan kaki, lengan, atau batang tubuh secara efektif karena kelumpuhan, kekakuan, nyeri, atau gangguan lainnya. Kondisi seperti ini bisa di sebabkan oleh, kecelakaan, bawaan lahir, penyakit, usia. Meskipun demikian keadaan seperti ini bisa berubah dari hari ke hari tergantung usaha mereka untuk

[13] *Ibid., 22.*

[14] Nur Kholis Reefani, *panduan Anak Berkebutuhan Khusus.* (Yogyakarta : Imperium 2013), 18

sembuh. Namun kondisi ini juga dapat berkontribusi pada disabilitas lain seperti gangguan bicara, (Tuna Wicara), gangguan penglihatan (TunaNetra) dan gangguan pendengaran,(Tunarungu).

2) Penyandang Disabilitas Intelektual, dahulu orang menyebutnya cacat mental, dan sekarang orang menyebutnya Disabilitas Mental. Disabilitas intelektual adalah mereka yang mengalami gangguan fungsi intelektual secara signifikan, dan gangguan prilaku adaptif. Spectrum penyandang disabilitas sangat luas antara lain *down siyndrom, autism, sulit untuk kosentrasi, gangguan jiwa.* Penyandang disabilitas memiliki IQ 35 hingga 70. Ada tiga faktor yang menyebabkan disabilitas intelektual yaitu, faktor sebelum dilahirkan, faktor saat dilahirkan, faktor setelah dilahirkan.[15]

4. Undang-undang Disabilitas

Pemerintah memiliki peran untuk menjamin dan melindungi masyarakat. Disahkannya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yang menjamin hak dan posisi mereka sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai

[15] Lembaga Bahtsul Masail PMNU, "*Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas", cet 1* (Jakarta, LBMNU, 2018), 24

kedudukan hukum dan hak asasi yang sama dengan warga lainya untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermantabat.[16]

Bagi penyandang disabilitas masih belum berfasilitasi dan masih banyak mendapatkan perlakuan diskriminatif dan dianggap merepotkan orang. Kondisi para penyandang disabilitas akan berdampak pada lingkungan social supaya bisa berpatisipasi di tengah masyrakat, keterbatasan layanan publik yang ramah disabilitas menjadi hambatan bagi para penyandang disabilitas. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yang saat ini berjalan empat tahun, masih memiliki cara pandang Undang-undang lama yang tertuang No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat dan masyrakat berasumsi bahwa penyandang disabilitas itu di pandang belas kasihan(*charity*), dimana kita harus bersikap baik terhadap mereka.

Para penyandang disabilitas tidak dapat melalukan keseharianya dalam kemandirian, dengan cara pandang tersebut akan menimbulkan stigma yang timbul dari sudut pandang para penyandang disabilitas adalah kelompok yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa berbuat sesuatu dan tidak mempunyai kemampuan. Undang-undang

[16] Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

inilah yang kemudian direvisi oleh Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

5. Fikih Disabilitas

Fikih yang merupakan hasil ijtihad tidak lepas dari adanya subjektif. Demikian halnya dengan aturan fiqih yang memang masih jauh dari inklusifitas terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu fikih ramah disabilitas di buat oleh parapemikiran mujtahid kontemporer, sehingga tidak terjadi salah dalam memahami fikih klasik, yang mengakibatkan terjadinya pemikiran yang melenceng dalam beragama. Perkembangan sosial budaya dalam peradaban manusia modern saat ini menjadi hal yang utama bahwa fikih pun harus berkembang.[17]

Fikih secara bahasa adalah memahami tujuan perkataan pembicaraan. Menurut istilah, fikih diartikan sebgai ilmi tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil terperinci, merupakan ilmu dari hasil pemikiran dan ijtihad, serta membuuhkan analisa dan penalaran[18]. Dan salah satu aspek kehidupan manusia sangat di perhatikan oleh islam sejak diturunkanya adalah

[17] Fikri Abdullah, *Resensi Buku Fikih Ramah Difabel*, Jurnal Inklusi, Vol 2, No 1 Januari – Juni (2015), 196.

[18] Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar,2014)* ,*3*.

masalah pemenuhan hak-hak dasar manusia terutama bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas di indonesia masih di pandang kurang terfasilitasi dan dianggap merepotkan. Kondisi tersebut dapat mengkibatkan sosialisasi para penyandang disabilitas seperti adanya pembatas. Dan mereka pun masih kurang dalam memiliki akses layanan umum , seperti akses pendidikan, kesehatan, maupun hal ketenagakerjaan. Kondisi tersebut seharusnya menjadi halangan bagi mereka untuk memperoleh hak hidup dan mempertahnkan kehidupannya.

Di dalam al-quran di ceritakan perihal nabi Muhammad yang mengabaikan seseorang penyandang disabilitas netra yang datang kepadanya. [19]Karena beliau sibuk mengadakan rapat bersama petinggi kaum quraisy perihal yang sangat penting, karena terkait dalam nasib kaum muslimin pada saat itu, sehingga Allah SWT menurunkan surat ‘abasa sebagai upaya untuk memberi peringatan kepada Muhammad SAW untuk tidak mengabaikan kaum nya yang memiliki kekurangan. Seorang penyandang disabilitas itu ialah bernama Abdullah bin

[19] Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 1080

Gummi yang saat itu memohon terhadap Rasulullah meminta bimbingan islam.[20]

Fikih Disabilitas juga mengandakan fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas untuk mendukung hak mereka dalam beribadah dan mendalami agama, fasilitas umum contahnya masjid, sekolah, madrasah, pesantren, mall, toilet dan lainya perlu menyediakan tempat

Bagi penyandang disabilitas. Namun faktanya, fasilitas tersebut di atas masih belum cukup ramah untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas dalam beribadah maupun perlakuan sehari-harinya.

6. Maqasyid Al-Syariah

Maqasid syariah merupakan konsep mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-quran. Yang ditetapkan Allah SWT terhadap manusia,yang tujuan akhir nya satu, maslahah dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun akhirat.[21]

---

[20] ibnuUmmi Maktum adalah sahabat Rasulullah yang terkenal. Satu-satunya orang buta yang turut hijrah dengan Nabi ke Madinah. Satu-satunya orang buta yang dua tiga kali diangkat Rasulullah s.a.w menjadi wakilnya jadi Imam di Madinah kalau beliau berpergian . Ibudari Ibnu Ummi Maktum itu adalah saudara kandung dari Ibu yang melahirkan Siti Khadijah, istri Rasulullah s.a.w. dan setelah di Madinah, beliau pun menjadi salah seorang tukang azan yang diangkat Rasulullah s.a.w disamping Bilal.

[21] Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*.(Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia 2019), 131

Kata maqasid adalah bentuk jamak dari maqsad yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah alah hukum-hukum allah yang sudah ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman manusia untuk mencapai kebahagian hidup didunia maupun diakhirat. Maka dari itu maqasid ini didefenisikan sebagai kandungan nilai dan tujuan persyariatan hukum.[22] Dengan menggunakan cara membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan, maqasid ini menjadi tujuan yang baik. Maqasid juga dimaknai sebagai kumpulan maksud konsep moral yang menjadi dasar hukum islam, antara lain seperti keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan dalam kerja bersama masyrakat[23]

Pada hakikatnya menurut istilah maqasid syariah ialah kewajiaban yang dibebankan syara' kepada mukalaf kembali kepada upaya untuk kemaslahatan manusia

Kajian teori maqasid syariah dalam hukum islam sebagai urgensi yang didasarkan pada pertimbangan. Oleh karena itu ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Jawaban pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakanya kajian terhadap berbagai

[22] Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung XLIV,* no. 118 (2009): 117-30, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15/11.

[23] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 32.

elemen hukum islam yang menjadi landasan tujuan hukum ituah setiap persoalan antar sesame manusia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian fiqih dan merupakan penelitian pustaka.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, penelitian ini banyak di gunakan dalam penelitian di bidang sosial dan tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan.[1]

a. Bahan primer (Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas dan lembaga PBNU Yogyakarta)
b. Bahan sekunder (Pusat Perkembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat “PPRBM”)

[1] Albi Anggito dan Johan setiawa, “*Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak 2018), 8.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada peneliti ini, adalah sebagai berikut:[2]

a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yang metode pendekatan yuridis disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, yakni pendekatan yang dilakuka

[2] Uin Alaudin Makassar, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Makassar: Alauddin Press, 2014), 16.

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

b. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.
c. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.
d. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.
e. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.
f. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

g. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

h. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

i. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

j. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

k. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

l. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan

seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

m. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

n. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

o. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

p. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

q. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

r. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

s. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

t. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

u. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

v. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

w. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan

seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

x. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

y. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

z. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

aa. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

bb. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

cc. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

dd. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

ee. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

ff. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

gg. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

hh. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan

seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

ii. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

jj. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

kk. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

ll. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

mm. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

nn. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

oo. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

pp. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

qq. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

rr. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

ss. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan

seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

tt. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

uu. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

vv. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

ww. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

xx. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

yy. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

zz. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

aaa. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

bbb. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

ccc. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

ddd. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan

seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

eee. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

fff. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

ggg. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

hhh. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

iii. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

jjj. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

kkk. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

lll. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

mmm. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

nnn. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

ooo. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan

seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

ppp. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

qqq. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

rrr. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

sss. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

ttt. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

uuu. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

vvv. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

www. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

xxx. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

yyy. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

zzz. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan

seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

aaaa. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

bbbb. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

cccc. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

dddd. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

eeee. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

ffff. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

gggg. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

hhhh. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

iiii. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

jjjj. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

kkkk. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan

seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

llll. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

mmmm. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

nnnn. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

oooo. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

pppp. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang.

qqqq. Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam .;;=

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

‘’’’’’’’’’?’’

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

“’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

rrrr. yang mu7sw,

QQQQQ*888888i1 luuuuuuuuuuuuu

ssss. mudah dari kesadaran jiwa yang bersih dan dilakukan dengan kemauan sendiri. [3]

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian deskriminatif-kualitatif adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mendapatkan data yang bersifat nyata tanpa adanya rekayasa sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan yang hasilnya lebih menekankan pada makna. Disini penulis, menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis dan normatif untuk memperoleh informasi mengenai hasil buku yang berjudul "FIQIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS", Yang di susun oleh lembaga PBNU. Dari perspektif undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas maupu perspektif maqasid syariah

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode Wawancara (*interview)*

Merupakan teknik pengumpulan data yang esensial dalam studi kritis dengan melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara

[3] Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Iindonesia, (*Jakarta: PT Raja Grafindo,2001), 18.

sistematis berdasarkan tujuan penelitian.[4] Wawancara ini dilakukan dengan penulis sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaaan itu bertujuan untuk supaya mengerti tentang perihal buku penyandang ramah disabilitas yang di buat oleh NU.

D. Konten Analisis Isi

Analisis konten merupakan suatu teknik yang sistematik untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Penganalisis tidak hanya tertarik pada pesan itu sendiri, tetapi pada pertanyaan-pertanyaan tentang proses dan dampak komunikasi. Definisi tersebut menunjukkan suatu tujuan utama dari analisis konten harus membuat inferensi. Peneliti tidak mungkin memahami dampak dari komunikasi tanpa membuat inferensi. Analisis konten selalu melibatkan kegiatan, menghubungkan atau membandingkan penemuan dengan beberapa kriteria atau teori. Penerapan analisis konten dalam metode skripsi ini menerapkan beberapa konsep dasar:

a. Data yang terkomunikasi kepeneliti
b. Konteks data
c. Pengetahuan peneliti dalam memahami realitas kehidupan

[4] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara 2010), 83.

d. Target analisis konten

e. Inferensi sebagai tugas intelektual dasar

f. Validitas sebagai kriteria keberhasilan yang pokok

Landasan konseptual tersebut dimaksud untuk mencapai tiga tujuan yaitu perspektif, analisis, dan metodelogis.[5]

[5] Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten, (* Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1993), 1-3

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

Di dalam hasil wawancara Fikih disabilitas ini melihat bagaimana orang-orang yang memiliki menyandang disabilitas dengan serba kekurangan yang mereka miliki. Pandang fikih pada orang-orang difabel itu memang tidak ada secara spesifik pada orang-orang difabel. Tetapi bisa kita baca dari awal sampai akhir dalam setiap bab buku itu selalu memberikan alternatif hukum bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan hukum yang semestinya, di dalam buku ini terbagi 27 permasalahan ubuddiyah, 18 masalah mualah, 24 dibidang siyasah, 25 dalam bidang ahwalulsyakhsiyah, kemudian kondisi disabilitas itu tidak mengakibatkan hilang sebagai subyek hukum, selama dia manusia atau kerja otaknya masih normal. Jadi, disabilitasnya itu tidak menjadi alasan untuk kemudian ia tidak menjadi subyek hukum. Jadi, dengan masalah yang sudah dibuat yang bersifat pasif harus sikapi dengan sifat-sifat progresif.

Dengan kemudian, semua fasilitas umum baik terkait unsur ibadah maupun tidak, mempunyai kesetaraan dan kesamaan bahwa pada akhirnya tidak alasan kaum disabilitas untuk malas atau berbuat seenaknya dan masih punya alasan untuk tidak sama dengan yang lain. Penyandang disabilitas dan manusia pada

umumya mereka mempunyai hak dan kewajiban setara dengan yang lain kecuali manusia yang tidak berfungsi otaknya tidak memiliki hak yang setara. Maka dari itu Negara wajib membuat kebijakan yang itu menjadi fasilitas semua orang baik yang normal maupun tidak.[1]

B. Pembahasan

1. Studi Kritis Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas.

a. Alasan NU merumuskan fikih ramah disabilitas

Pada dasarnya semua manusia di ciptakan Allah Swt *fi ahsan taqwin (*dalam bentuk sempurna). manusia adalah karya yang agung dari Allah Swt. Allah telah menganugrahkan pada manusia kemampuan untuk membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Namun, allah menciptakan manusia tidak seragam, manusia lahir membawa kelebihan dan keterbatasan masing-masing.

Penyandang disabilitas di Indonesia masih di pandang kurang terfasilitasi bahkan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan dianggap mereptkan. Kondisi penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan masyarakat untuk berpatisipasi dalam kasus ini. Para penyandang ini pun masih mengalami hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam ketenagakerjaan.

[1] Wawancara dengan Roy Purwanto di Kampus UII Yogyakarta, tanggal 25 Agustus 2020.

Kondisi ini pun tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupanya. Landasan konstitusional bagi perlinduangan penyandang disabilitas di indonesia, bisa kita lihat di dalam ketentuan Pasal 28 A UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memprtahankan kehidupannya. Dan di indonesia pun sudah ada hara penyandang disabilitas yang di buat oleh PBB. Yaitu, setiap tanggal 3 Desember memperingati sebagai hari Penyandang Disabilitas Internasional. Yang dirintis dengan PBB dari tahun 1992.

Dalam kehidupan beragama, kekurangan akses dan fasilitas yang berpihak pada penyandang disabilitas juga menjadi dasar perlu nya kajian ini. Menyusun konsep utuh tentang fikih yang ramah terhadap penyandang disabilitas menjadi penting akan hal nya kita sebagai umat Islam. Hal ini selain selain memberikan dasar teologis yang berpihakan terhadap penyandang disabilitas yang umat muslim, juga memberikan panduan terhadap mereka untuk melakukan akses beribadah sesuai kondisi dan kemampuanya.[24]

Fikih disabilitas juga mengandaikan adanya fasilitas ramah bagi para, surah, dan sebagainya) dan bagian lembaga penyandang disabilitas terutama dalam mendukung hak-hak mereka dalam beribadah dan

[24] Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* : (Cet 1) (Jakarta: LBMNU, 2018), 18.

mendalami agama. Di masjid-mesjid, sekolah/madrasah, pondok pesantren dan lainya. Perlu menyediakan tempat yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti toilet, tempat wudhu dan lain-lain. Namun faktanya sejumlah besar tempat ibadah seperti (masjidpendidikan pun belum juga bisa dikatakan ramah untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas dalam beribadah dan mendalami agama.

Dalam tata pergaulan, para penyandang disabilitas juga merasa mengalami perlakuan yang kurang adil. Misalnya, para penyandang tunanetra dalam jual beli sering dipertanyakan yang keabsaham tandatangan seorang tunanetra sehingga ini menjadi kendala baginya untuk mendapatkan perlakuan adil dalam jual beli. Belum lagi penyandang disabilitas yang di bilang sulit untuk mencari pekerjaan yang layak untuk mereka. Karena masalah ini sering terdiskriminasi dan dianggap para penyandang disabilitas lebih layak memiliki pekerjaan yang rendaah.

Dalam aspek pernikahan dan keluarga banyak juga mempertanyakan keabsahan akad nikahnya, terutamanya bagi penyandang tunarungu yang tidak bisa mengucapkan akad, atau tunadaksa yang tidak punya kaki untuk bersalaman. Dalam pernikahan banyak mengalami perceraian karena alasan disabilitas yang disandangkannya dan banyak juga anak-anak yang memiliki

penyandang disabilitas juga memperoleh pengasuhan yang diskriminatif dalam keluarga

Dalam aspek siyasah, di dapatkan persepsi penyandang disabilitas yang terdiskriminasi dalam mengakses berbagai fasilitas public, selain itu mereka mempertanyakan bagaimana hukum-hukum berbagai pihak yang tidak mau memberikan keberpihakan pada penyandang disabilitas, kususnya akses kesehatan, keterlibatan dalam membuat kebijakan publik, dan pihak-pihak tertentu yang hanya mengambil manfaat dari penyandang disabilitas dengan berpura-pura sebagai penyandang disabilitas.[25]

Di dalam ruang lingkup buku ini melibatkan pusat studi dan layanan disabilitas (PSLD) yang di Universitas Brawijaya Malang yang telah meyelenggaran halaqah fikih ramah disabilitas. Yang menghadiri para Kyai, Akademisi, dan Aktivis Disabilitas tersebut membahas persoalan- persoalan keseharian penyandang disabilitas. Dari hasil halaqah tersebut mendapatkan rekomendasi yang dapat sebagai acuan atas panduan bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan ibadah sesuai dengan syari'at Islam.

Sementara itu penghimpunan pengembangan pesantren dan masyrakat (P3M) juga memiliki kepedulian isu ini. P3M juga telah menyelenggaran halaqah tersebut untuk membantu menyiapkan materi

[25] *Ibid., 30*

yang akan di bahas oleh bahstsul masail tentang penyandang disabilitas di forum Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama. Dalam langkah ini P3M melakukan *research* yang *pertama*, identifikasi kebutuhan (*need assessment)* dengan masalah ini penyandang disabilitas. Workshop ini menghasilkan sejumlah rmusan permasalahan terkait cara pandang negatif masyarakat, dan diskriminasi dalam kegiatan sosial –kemasyrakatan dan pemahaman keagaamn yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. *Kedua*, penyusunan rekomendasi dan fikih penyandang disabilitas. Dan penyusunan buku fikih penyandnag disabilitas yang di dalamnya terdapat dalil-dalil keagagamaan yang mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aktifitas di bidang keagaaman. *Ketiga*, P3M melibatkan pengurus besar PBNU, Kementrian Sosial, Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Berangkat dari kesamaan tujuan dalam mengembangkan fikih ramah disabilitas maka semua hasil halaqah P3M, PSLD dan Bahstsul Masail menjadi sebuah buku Fikih Disabilitas.

Focused Group Discussion mengumpul empat contoh penyandang disabilitas (Disabilitas Daksa, Tuli, dan Netra) tujuan untuk mengaggali berbagai permasalahan penyandang disabilitas dalam

menjalankan syariah dalam mejalanka kegiatan sehari-hari.[2] Kegilasan yang dialami para penyandang disabilitas dalam banyak hal terutama hal ibadah selain itu juga banyak hal lain non ibadah itu juga semestinya menjadi konsen. Terutama konsen dalam kelompok kajian muslim atau Islam. Sebagaimana menjadi tantangan bersama bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil' alamin yang mencakup dan mampu melindungi semua orang salah satunya adalah kelompok para penyandang disabilitas yang selama ini banyak sekali dilupakan ataupun tidak diikutkan. Bahkan mendapat banyak ustad-ustad ceramah banyak menggunakan analohi-analogi yang tertuntu. Belum lagi islam menghadapi tantangan-tantang hukum dan perilaku-perilaku diskriminatif. Dan lantas, yang dilakukan adalah kita harus menggali permasalahan yang di hadapi para penyandang disabilitas. Yang di tulis pada buku ini bukan suara peneliti tetapi suara para penyandang disabilitas yang diantara nya para penyandang disabilitas penulis buat diatas. Maka dari itu semua ini harus dilandasi secara fikih, agama bagaimanapun ada aturanya. Cara paling utama dalam mengimplematasikan keadilan bagi para penyandang disabilitas adalah melalui hukum agama. Karena agama sebagaimana kita di Indonesia ini sangat kuat.karena itu lah maslah digali.

[2] Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilita*s : (Cet 1) (Jakarta: LBMNU, 2018) 3-8

b. Tujuan NU Membuat Fikih Ramah Disabilitas

Berdasarkan tantangan dan hambatan yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas buku ini memiliki tujuan yang cukup sangat intelektual dan berimpati terhadap para penyandang disabilitas :

1) Memberi penyandaran kepada masyarakat agar tidak memperlakukan para penyandang disabilitas secara diskriminatif.
2) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap para penyandang disabilitas dalam pendidikan dan sarana peribadatan
3) Mendorong pemerintah agar memudahkan akses informasi dan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam segala lini kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan
4) Mengubah pandangan yang negatif menjadi respek dan penuh empati oleh berbagai pihak terhadap penyandang disabilitas. Pandangan yang penuh rasa iba (kasihan) agar di ubah menjadi pandangan pemberdayaan dan pemenuhan hak disabilitas.

Terlebih mereka menyandang disabilitas bukan semata-mata kehendandak nya sendiri melainkan sevagai karunia Allah. Oleh karena itu dalam perspektif islam menghargai penyandang disabilitas adalah menghargai ciptaan Allah. Mereka punya hak untuk di hormati dan dihargai, artinya sama seperti manusiayang lain, penyandang disabilitas juga memiliki *karamah insaniyah* (martabat

kemanusiaan). Maka dari itu para penyandang disabilitas harus bebas dari tindakan tak manusiawi.

c. Undang-Undang Disabilitas

Kedudukan aksebilitas penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Aksebilitas adalah sarana yang disediakan untuk dapat memudahkan dan mewujudkan kesamaan dan kesejahteraan hak bagi para penyandang disabilitas.[3]

Umur Undang-Undang No. 18 tahun 2016 masih terbilang cukup muda yaitu hanya terjarak empat tahun dengan saat ini. Akan tetapi, dengan di terbitkanya Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah peduli dan serius terhadap penyandang disabilitas dalam membenahi permasalahan penyandang disabilitas saat ini. Untuk dapat memulai penanganan terhadap permasalahan yang diahadapi oleh penyandang disabilitas perlu penunjang yang dapat mendorong terlaksanaanya Undang-Undang tersebut seperti memulai stigma masyarakat terhadap para penyandang disabilitas dari pandangan negatif menjadi pandangan positif yang penuh rasa empati ataupun rasa peduli oleh berbagai pihak dan juga mengganti pola pendekatan kepada penyandang disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan kesejahteraan sosial diubah

[3] Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

menjadi pola pendekatan pemenuhan hak dan kewajiban bersama.[4] Tentu perubahan stigma masyarakat seperti itu memerlukan dukungan dengan fasilitasnya yang terpenuhi hak-hak para penyandang disabilitas dan kesejahteraan nya pun harus dapat terpenuhi oleh pemerintah maupun organisasi (Lembaga). Sebagai penyelenggara atas hak aksebilitas, pemerintah mempunyai peran dalam hal ini ialah sangat penting untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kemudahan aksebilitas untuk rakyatnya yang mengalami penyaandang disabilitas. Sesuai dengan apa yang ada tertera di dalam Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 18 akan hak aksebilitas yang harus mereka dapatkan. Maka penyediaan aksesbilitas yang ada bersifat publik untuk para penyandang disabilitas masih kurang ramah terhadap para penyandang disabilitas.

Demi terlaksananya Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas secara maksimal perlu kerja sama dari semua pihak terkait khusus nya jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan juga seluruh lapisan masyarakat yang mendukung agar Undang-Undang tersebut berjalan dengan dengan baik.

Dalam literature bahasa ingris, istilah hukum islam (*Islamic law*) umumnya mengacu pada empat terma bahasa arab yang berbeda-beda,

[4] Nur Paikah, "Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak di Kabupaten Bone", *Jurnal Ekspose,* Vol 16, No.1 (2017),336

yaitu fikih, syariat, qanun, uruf. Kata fikih digunakan di al-alquran dan hadis dalam berbagai bentuk yang mengacu pada makna pemahaman, pengertian, dan memperoleh pengetahuan agama secara umum. Kata "fikih" di definisikan ilmu tentang hukum-hukum syariat yang praktis yang di gali oleh dalil-dalil yang teperinci. Adapun yang dimaksud dengan dalil-dalil teperinci di sini adalah ayat-ayat al-quran dan riwayat-riwayat hadis. Jadi terma fakih (*faqih)* yang digunakan untuk menunjuk kepada manusia yang memiliki pemahaman (*fahm,)* persepsi (*tasawwur),* kognisi (*idrak).*[5]

Menurut para ulama yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali, pada mulanya fikih berarti pengetahuan dan pemahaman. Dikatakan, *fulan yafqahul khaira wasy syar:* jika dia tahu dan memahaminya. Akan tetapi tetatpi kemudian ulama mendefinisikan dengan ilmu tentang hukum *syar'iyyah* berkaitan dengan perbuatan mukalaf secara khusus. Tasyri (penetapan hukum) yang disandarkan kepada agama seperti ini, dimaksudkan untuk kemaslahatan individu dan masyarakat. Ini tentu saja tujuan psikologis, hanya saja ia ingin membangun masyarakat ideal yang bersih dari segala hal yang menafikan agama dan akhlak. Oleh karena itu, tidak mungkin menetapkan sesuatu yang enafikan salah satu diantara keduanya. Selain itu, ia tidak juga bertujuan untuk membangun masyarakat yang selamat, akan tetapi juga menciptakan kebahagaian individu,

[5] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (*Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), 100.

masyarakat, dan semua manusia di kehidupan di dunia ini, dan juga kehidupan dunia dan akhirat. Demikian fikih ini bertujuan untuk memperbagus seseorang melaksanaka kewajibanya baik kepada diri sendiri, saudaranya dalam hal kemanusiaan, juga kewajibanya kepada allah dengan beribadah kepadanya sebenar-benar ibadah. Fikih islam tidak diragukan lagi menjaga hak seseorang. Ia membolehkan bagi orang tersebut untuk menggunakanya sesuai keinginanya dan melidunginya dari gangguan orang lain. Akan kah disampig itu, disisi lain syariat islam juga menegaskan supaya dalam penggunaan hak ini jangan sampai menimbulkan kerugian (mudarat) bagi orang. Yaitu kerugian yang sangat besar pada diri seseorang dibandingkan dengan kerugian pembatasan kebebasan pemilik hak ini. Hal ini sebagai bentuk aplikasi sebuah kaidah "*La dharara wa la dhirara* (tidak boleh merugikan atau membahayakan orang diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain) juga kaidah menghidari bahaya yang lebih besar dengan memilih bahya yang lebih kecil. Kaidah ini mengatur dalam menggunak hak. Yang di implemasikan dengan kemaslahatan orang lain. [6]

Dengan demikian, Undang-Undang yang merupakan buatan manusia pada awalnya tidak memperhatiakan pandangan sosial. Undang-Undang telah mengatur hak aksebilitas dalam. Undang-Undang ini mendukung hak

[6] Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), 5.

aksebilitas para penyandang disabiltas yang mungkin harus di talaah mudaratnya yang timbul dalam penggunaan hak-haknya. Hanya saja, ada satu kebenaran yang tidak diragukan lagi bahwa pandangan syariat kepada hak-hak invidu dan pembatasnya kepada hak penyandang disabilitas bisa menciptakan kemaslahatan jamaah dan tidak menimbulkan kemudhratan individu pemilik hak tersebut. Maka dari itu kita meyakini bahwa pembedaan (diskriminasi) yang jelas ini, antara karakter hukum tuhan *(syariat Ilahiyyah)* dengan karakter hukum manusia merujuk pada diskriminasi pokok dasar hak-hak invidu dalam syariaat dan Undang-Undang.[7] Demikianlah kondisi kita yang sangat menyedihkan saat ini ialah seolah-olah kita ini ibaratkan bangsa yang tidak memiliki pedoman agama dan adat-istiadat yang baik.

Maka dari itu, kita tetap bersyukur kepada Allah Karena sekarang kita telah melihat fajar baru untuk membuka hari-hari dimana kita mulai merdeka.bahkan didemensi humkum kita sudah berupaya dan tidak jauh dengan syariat hukum Islam dan mengambil manfaat olehnya.

d. Fikih Disabilitas

Dalam kehidupan beragama Islam, kisah yang sangat melekat tentang penyandang disabilitas adalah saat itu baginda Rasulullah SAW mendapatkan teguran dari allah karena mengabaikan seseorang para penyandang disabilitas tunanetra. Terdapat diriwayat ketika sahabat

[7] *Ibid., 83.*

Abdullah Ibnu Maktum mendatangi sang baginda Rasulullah SAW untuk meminta bimbingan tentang Islam, disaat yang bersamaan Nabi tidak menghiraukan sang Ibnu Maktum. Sehingga turun surat 'Abasa untuk memperingati rasul agar lebih memperhatiakan seorang tunanetra tersebut dan lebih mengutamakan urusan tunanetra terlebih dahulu dari pada petinggi kaum Quraisy. Sejak saat itu Rasul memuliakan penyandang disabilitas dengan memberikan dan memenuhi hak-haknya mereka selaku seorang muslim.[26]

Kisah teladan tersebut yang Rasul sangat memuliakan para penyandang disabilitas adalah sebagai contoh kita bahwa islam ini agama yang memberikan khusus terhadap para penyandang disabilitas sebagai prioritas utama yang harus diperhatikan hak-haknya. Sollidaritas yang ada di tengah-tengah kehidupan beragama antar sesame muslim perlu dibangun tatanan kehidupan sosial maupun beragama antar sesame muslim dapat dijalani dengan syariat islam. Secara garis besar islam sudah menerapkan hak-hak dari penyadang disabilitas, maka dari itu perlu penunjang yang dapat menjadi panduan bagi para penyandang disbilitas dalam melaksanakan ibadah untuk menjalan kan perintah Allah SWT. Serta menjauhi segala larangannya, sebagai seorang hamba yang taat kepadanya.

[26] [26] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir,* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 1080

Al-Quran dan hadis menjadi landasan kaum muslim dalam melaksanakan dan menjalankan syariat yang sudah ditetapkan dan fikih menjadi landasan yang mengatur tatanan dan susunan dalam beragama serta membahas berbagai persoalan hukum dalam mengatur beragam macam aspek kehidupan. Seiring berkembangmnya zaman fikih yang merupakan hasiil ijtihat tidak lepas dari unsur subjektif. Dalam hal ini terkandung di Al-Quran surat An-Nur 61:

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ

حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ

أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ

تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : Tidak ada halangan bagi orang buta tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit dan tidak pula bagi diri kami makan dirumah kamu, di rumah saudara kamu yang laki-laki, dirumah saudara kamu yang perempuan, dirumah saudara bapak kamu yang laki-laki, dirumah saudara bapak kamu yang perempuan, dirumah saudara ibu kamu laki-laki, dirumah saudara ibu kamu perempuan atau dibawah orang-orang yang di bawah kekuasaan kamu atau dirumah sahabatmu, tidak ada dosa bagimu makan bersama-sama mereka atau terpisah. Bila kamu memasuki rumah-rumah maka hendaklah kamu memberi salam kepada diri kamu sendiri, dan salam dari sisi allah yang di beri berkat lagi baik.Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirnya.[8]

Menurut Mustafa Al-Maraqdi dalam buku Hmenyebutkan sebab turunya ayat ini bahwasanya kaum muslimin merasa kesulitan untuk makan bersama orang buta, karena dia dapat berebut makanan dan bersama orang sakit, karena dia tidak menikmati makanan.

[8] Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Qur'an* dan *tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 354

Orang buta, orang pincang dan orang sakit, boleh kita bawa makan kerumah-rumah itu. Diakhirnya di jelaskan lagi bahwasanya apabila kita masuk kedalam rumah siapapun maka hendak lah mengucap salam.[9]

Persoalan terhadap disabilitas belum menjadi perhatian bagi kalangan mujtahid fikih dan sungkar ditemui sehingga aturan yang dibuat dari fikih masih jauh dari kesetaraaan dalam memfasilitasi hak-hak terhadap penyandang disabilitas. Maka, sangat dibutuhkan konsep yang utuh tentang fikih yang ramah terhadap penyandang disabilitas, kontruksi fikih yang penting agar dapat segera dilakukan oleh para mujtahid kontenporer.

Permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas merupakan permasalahan kita semua. Sebagai sesame makhluk ciptaan Allah yang di tugas kan oleh Allah untuk saling menolong dalam hal kebaikan. Salah satunya dengan mendukung hak-hak penyandang disabilitas untuk beribadah dan mendalami agama. Sehingga keterbatasan yang mereka miliki tidak menjadi penghalang bagi mereka para penyandang disabilitas untuk melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban dalam beragama. Dengan memberi support dan dukungan yang penuh kepada mereka dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.

[9] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maragh*i, (Semarang, PT Karya Toha Putra, 1993), 169.

Sehingga kebersamaan dan kesejahteraan dapat dirasakan setiap kalangan tanpa terkecuali sedikitpun.

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

Artinya: *Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.*[10]

Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi perkecualian, yakni tidak pernyataan bahwa kecuali orang buta dan

[10] Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Qur'an* dan *tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 354

seterusnya. Ini tidak mengisyraratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak di bebani untuk ikut didalam medan perang. [27]

Permasalahan dikalangan penyandang disabilitas yang didalamnya aspek-aspek seperti segi agama yaitu :

1) *Ubudiyah* (ibadah), yaitu sesuatu yang terkait aksesbilitas dari penyandnag disabilitas diamana tempat-tempat ibadah seperti masjid, surau, mushollah masih belum ramah bagi mereka. Lalu fasilitas utama seperti tempat wudhu dimesjid masih belum mendukung mereka untuk mudah bagi mereka dalam melaksankan ibadah
2) *Muamalah* (pergaulan), diskriminatif masih terjadi dikalangan disabilitas baik dimasyrakat, sekolah, perguruan tinggi hingga ranah pekerjaan. Sehingga keterlibatan masyarakat dengan para penyandang disabilitas untuk dapat merubah pola pergaulan serta cara pandang masyarakat terhadap kaum disabilitas sebqagaimana manusia yang sama layaknya manusia lainya.
3) *Siyasah* (kebijakan public) merupakan kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah kepada para penyandang disabilitas sebagaimana rakyat yang sama haknya dan juga membantu mengaangkat harkat martaabatnya sebagai warga masyarakat Negara Republik Indonesia

[27] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan keserasian al-Quran,(*Jakarta , Lentara hati, 2002),196

4) *Ahwalulsyakhsiyah* (pernikahan dan keluarga) pada aspek ini banyak kalangan masyarakat mempertanyakan bagaimana dengan keabsahan orang bisu bagi penyandang tunawicara dan bagaimana orang yang tidak mempunyai tangan untuk berjabat tangan dan lain sebagainya. Sehingga persoalan akan diskriminasi terhadap mereka seolah mereka adalah makhluk yang sangat penuh kekurangan dan didalam dirinya merasakan selalu berada dalam sebuah masalah.

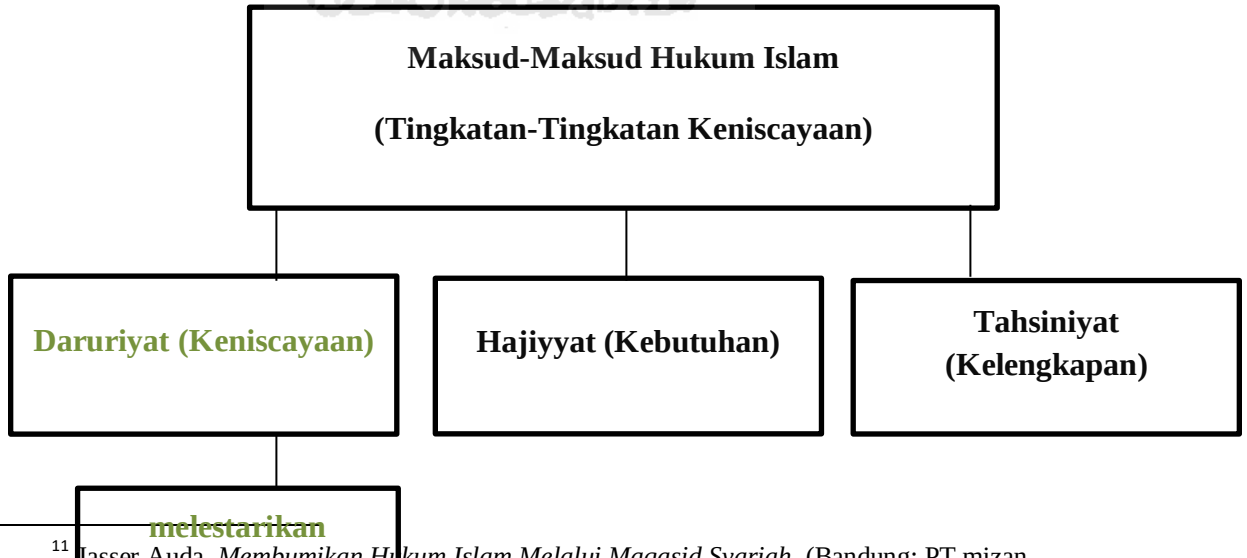
2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap gagasan fikih ramah disabilitas

Maqasid merupakan sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu, atau dapat disebut sebagai pernyataan alternatif oleh sejumlah teoretikus hukum islam adalah *masalih* atau kemaslahatan-kemaslahatan. Dalam ini peneliti membahas bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Gagasan Pemikiran Fikih Ramah Disabilitas dalam Perspektif Maqasid Syariah.

a. Dimensi-dimensi Maqasid

"klasifikasi tradisional membagi Maqasid menjadi tiga tingkatan keniscayaan yaitu: Keniscayaan (*daruriyat),* kebutuhan (*hajiyyat),* kelengkapan (*tahsiniyat)*. Daruriyat terbagi menjadi perlindungan agama *(hifz al-din),* perlindungan jiwa raga *(hifz al-nafs),* perlindungan harta *(hifz al-mal),* perlindungan akal *(hifz al-aql),* perlindungan keturunan

(hifz al-nasl) dan beberapa pakar ushul fiqh menambahkan perlindungan kehormatan *(hifz al-ird)"*.[11]



[11] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,* (Bandung: PT mizan Pustaka, 2015), 32.

Gambar 4.3

Hierarki Maqasid Menurut Tingkatan Keniscayaan

Sumber: Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,* 2015

Dengan maqasid syariah merupakan salah satu epistemologi hukum islam diharapkan dapat membesarkan hukum yang bisa berfungsi dengan terciptanya stabilitas dalam kehidupan, dengan mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak. Maka dari itulah menjadi kemaslahatan bagi manusia dan inti dalam isi Maqasid syariah itu. Yang mana memiliki tatanan bagi para penyandang disabilitas yan perlu diutamakan. Berikut Maqasid syariah yang akan peneliti bahas :

1) Hifzuddin (perlindungan agama)

   Bentuk perlindungan agama pada para penyandang disabilitas dapat terlihat dengan program-program ibadah yang sangat diutamakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:

a) Istinja yang tidak sempurna dari penyandang disabilitas yang diterangkan dibuku terjawab bahwa meminta bantuan kepada pasangan halalnya (suami atau istri), dan jika tidak mempunyai pasangan maka dengan cara apapun yang memungkinkan.
b) Cara bersuci bagi disabilitas netra yang tercantum di buku ini ialah dengan berdasarkan dugaan kuatnya dengan cara memaksimalkan indra yang berfungsi
c) Shalat menggunakan kursi roda dan tongkat di masjid yang sedemikian hukum nya diperbolehkan dengan syarat kursi nya tidak ikut bergerak dan mensucikan terlebih dahulu alat bantunya.
d) Kewajiban shalat bagi penyandang disabilitas netra sekaligus disabilitas rungu terdapat kemudahan bahwa bagi para penyandang disabilitas netra dan rungu sekaligus maka tidak diwajibkan shalat karena syarat wajib shalat diantaranya adalah mendengar dan melihat
e) Kewajiban menyediakan fasilitas masjid yang aksibel bagi para penyandang disabilitas dalam konteks ini maka Negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap semua kalangan masyarakat yang sehari-harinya menjalani kehidupan yang nyaman, begitu juga ruang public yang ramah terhadap penyandang disabilitas seperti tempat wudu dan lain-lain.

Dalam hal ini dari berbagai masalah yang ada dalam lingkungan para penyandang disabilitas. Maka dapat kita lihat bahwasanya NU berusaha untuk menjaga dan tetap memperhatikan kegiatan agama terhadap masyarakat terutama yang mengalami penyandang disabilitas. Maka penting juga pemerintah ataupun non pemerintah agar harus menyediakan ketersediaan fasilitas peribadatan yang ramah terhadap penyandang disabilitas sesuai kemampuannya.

2) Hifzumali (perlindungan harta)

Bentuk perlindungan harta dalam penerapan ini islam memiliki wujud perlindungan terhadap para penyandang disabilitas (grahita, rungu, netra) contoh nya ialah :

a) Dalam bertransaksi ada tiga hal yang agar mereka terlindungi dalam transaksi dengan perwakilan (*wakalah),* barang dengan sifatnya jelas (*bay maushuf fi az-zimmah),* larangan transaksi (*hijr).* Dengan tiga model ini perlindungan tranksaksi ini, maka asset penyandang disabilitas aman. Apabila mereka bertransaksi namun merasakan kerugian, maka transaksi nya batal demi hukum sehingga bisa dituntut agar dikembalikan.

b) Pekerjaan bagi para penyandang disabiliatas, bekerja adalah kewajiban semua orang terkecuali yang tidak mampu dengan segala keterbatasan fisiknya. Seorang disabilitas tetap dituntut

untuk menghidupi dirinya sendiri. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengatur hal tersebut, maka tugas pemerintah telah terlaksana, Negara kepada perusahaan memberikan kuota kepada penyandang disabilitas 2% bagi instansi pemerintah dan 1% bagi swasta. Dan dengan upah sesuai kapasitas sanggupan dirinya sendiri.

3) Hifzun- nasli (perlindungan keturunan)

Pada abad ke-20 M para penulis maqasid secara signifikan mengembangkan "perlindungan keturunan" menjadi teori berorientasi keluarga.[12]

a) Perceraian

Ada sebuah cerita sepasang yang suami istri yang sudah menikah. Di tengah perjalanan hidupnya salah satu dari pasangan tersebut mengalami disabilitas disebabkan kecelakaan. Dengan terjadi tragedi tersebut salah satu pasangan yang non-disabilitas meninggalkan pasanganya secara langsung. Dalam segi UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 dan komplikasi pasal 110 justru di perbolehkan karena yang terkena disabilitas tidak mampu lagi menjalankan

[12] Jasser Auda , *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,* (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2015), 56.

kewajibanya sebagai suami istri. Di dalam islam haram hukumnya karena tindakan pembangkangan seorang istri terhadap suami.

b) Warisan

Para penyandang disabilitas tetap dijamin untuk mendapatkan hak warisan dengan catatan memenuhi syarat yang di dapatnya.

c) Pernikahan

Pada dasarnya penikahan sesuatu yang sunnah hukumnya bagi yang sudah berasrat dan kesanggupannya. Dengan proses akad nikah yang biasanya dilakukan secara lisan dan berjabat tangan. Namun proses ini yang menyulitkan bagi penyandang disabilitas rungu dan daksa. Maka dari itu penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat dan penyandang disabilitas daksa tidak harus memakai tanga dikarenakan berjabat tangan tangan bagi orang yang sedang melakukan akad nikah bukan termasuk dalam rukun dan kewajiaban. Maka tanpa tangan dianggap sah.

4) Hifzul-aqli (perlindungan akal)

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Dalam hal ini Islam pun juga mewajibkan semua umatnya untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tinginya, sayangnya kesadaran pemerintah yang

menyelengarakan hak-hak kepada para penyandang disabilitas masih tergolong rendah. Berikut masalah yang ada yang dialami penyandang disabilitas :

a) Masalah tentang kebijakan lembaga pendidikan dan majlis taklim jika lembaga pendidikan dan majelis dengan jelas menyelengaran kebijakan tersebut maka dapat digolongkan menjadi hal yang wajib menyediakan fasilitator terhadap penyandang disabilitas.
b) Masalah tentang pemberian edukasi mengenai penyandang disabilitas, yang dalam hal ini pemerintah dan ormas-ormas islam harus mensosialisasikan kesadaran tentang penyandang disabilitas. Dan masyarakat pun juga diberi edukasi tentang hakya para penyandang disabilitas di lembaga pendidikan terutama pasantren. Pemberian edukasi ini dianggap penting karena islam tidak memandang penyandang disabilitas sebagai manusia yang tercela.
c) Tanggung jawab pemerintah atau Negara terhadap pendidikan penyandang disabilitas yang secara jelas diatur oleh UU. Maka dari itu tanpa terkecuali lembaga pendidikan baik formal dan non-formal lebih bisa mengemban dan bertanggung jawab supaya tidak melantar para penyandang disabilitas dibidang pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat di ditarik kesimpulan untuk memenuhi tujuan penelitian yang telah dirancang sebelumnya berikut merupakan beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Latar belakang NU merumuskan fikih ramah disabilitas ialah adalah kegelisahan yang dialami oleh teman-teman penyandang disabilitas dalam banyak hal terutama dalam kaitanya dengan ibadah, setelah itu banyak hal-hal lain dengan non ibadah itu semestinya juga menjadi fokus terutama dalam kelompok kajian muslim sebagaimana menjadi tanggapan bersama bahwa Islam itu ialah rahmatan lilalamin. Rahmatan lilalamin ialah mencakup dan mampu melindungi semua orang salah satu nya ialah kelompok disbilitas yang selama ini ternyata fakta dilapangan banyak sekali yang dilupakan ataupun tidak diikutkan. Jadi yang ditulis dalam buku ini bukan suara para pembuat buku akan tetapi suara para penyandang disabilitas. Dan masalah-masalah yang dialami oleh mereka yaitu ubudiyah,

muamalah, siyasah, dan ahwalulsyakhsiyah. Semua ini harus dilandasi dengan fikih.

2. Tinjauan maqasid syariah terhadap gagasan fikih ramah disabilitas memiliki prinsip-prinsip maqasid syariah pada masalah-masalah yang diahadapi oleh penyandang disabilitas didalam buku tersebut sudah dilaksanakan dengan memperhatikan keurgensianya. Dari kelima prinsip dasar Maqasid Syariah yakni hifzun-nasli (perlindungan keturunan), hifzul-aqli (perlindungan akal), hifzun-nafsi (perlindungan jiwa raga), hifzuddin (perlindungan agama), hifzulmali (perlindungan harta). Hanya empat prinsip yang mengandung dalam tinjauan maqasid. Sedangkan unutk perlindungan terhadap jiwa raga belum dilaksanakan dengan utuh.

B. Saran

Setelah dilakukan pembahasan mengenai hasil penelitian yang didapat, maka penulis memberikan beberapa saran untuk pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi penyandang disabilitas

   Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas maupun masyarakat, diharapkan selalu menananmkan nilai-nilai keislaman serta tidak pernah merasa rendah diri terkait keadaan yang dimiliki.

2. Bagi pemerintah

   Pemerintah diharapkan segera merealisasikan program-program yang ditujukan untuk para penyandang disabilitas, serta selalu melakukan

perbaikan dan perkembangan secara berkelanjutan. Masalah utama yang harus segera ditangani oleh pemerintah , yakni aksesbilitas bagi penyandang disabilitas harus bisa dipenuhi hak-haknya mereka dan juga fasilitas public. Sehingga dapat meringankan dan memudahkan para penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-harinya.

Daftar Pustaka

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Narbuko,Chalid dan Abu Achmad Langkah-Langkah , *Metode Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Yang Benar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Fikri, Abdullah. *"Fikih Ramah Difabel"*, Inklusi 2.1 2015

Inayah,"Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." Legal Standing: *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2, (2020). Journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/2311.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke Empat*, Dapartemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008.

Lembaga Bahtsul Masail PBNU*,''Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas''* : Cet 1 Jakarta LBMNU, 2018

Makassar, Uin Alauddin. "*Pedoman Karya Tulis Ilmiah."(*Makassar: Alauddin Press, 2014)

Moleong, Lexxy J. "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: Rosda, 2007.

Nugrahani, Farida,. "*Metode Penelitian Kualitatif*." Solo: Cakra Books, 2014.

Reefani, Nur Kholis. "Panduan Anak Berkebutuhan Khusus." Yogyakarta: Imperium, 2013.

Salahudin, Muhammad, *Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis*: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid al-Syariah, Ulumuna: Jurnal Studi ke Islaman 16, No 1. (2012)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta." Cet. VII (2009).

Sukmadinata, Nana Syaodih. "Metode Penelitian Pendidikan" penelitian memberikan deskripsi, eksplanasi, prediksi, inovasi, dan juga dasar-dasar teoritis bagi pengembangan pendidikan." Bandung: UPI dan PT. Remaja Rosdakarya (2011).

Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas

Zuchdy,Darmiyati,*Panduan Penelitian AnalisisKonten*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1993

CURRICULUM VITAE

168 cm

62 kg



NAMA : ASRAFUL ILMI

TEMPAT & TANGGAL LAHIR : Pariaman 14 april 1998

ALAMAT : jl. Kaliurang km 12.5 rt 04 rw 05

JENIS KELAMIN : laki-laki

STATUS : Belum menikah

AGAMA : ISLAM

NO TELP : 082135227255

EMAIL : Asrafbuyung200@gmail.com

Pendidikan Formal

1. 2005 – 2010 : SD 03 pasar Negeri Sarolangun
2. 2010 – 2013 : pondok pesantren nurul ikhlas padang panjang
3. 2013 – 2016 : pondok pesantren nurul ikhlas padang panjang
4. 2016 : Universitas islam Indonesia
5. Ip : 3,2

Pengalaman organisasi

1. 2016 : Kader HMI
2. 2017 : anggota futsal azelso

Skill

1. Cepat Dalam Mengitung
2. Berbisnis

Hobby

1. Olahraga
2. Bekerja Keras
3. travelling

LAMPIRAN

I. Pedoman Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di ruang Dekanat Fakultas FIAI Universitas Islam Indonesia pada hari selasa 25 Agustus 2020 pada jam 13.00 dengan salah satu tokoh NU.

A. Daftar Informan

Nama : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag
Dosen : Ahwalulsyakhsiyah
Jabatan : Wakil Dekan FIAI

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan :Apa yang melatarbelakangi NU merumuskan fikih ramah disabilitas ?

Jawab : Melihat orang yang dulunya penyandang cacat dan sekarang diganti menjadi kata penyandang disabilitas , dan juga NU merumuskanya karena kemaslahatan umatnya yang masih di bilang belum adil dan juga mempermudah para penyandang disabilitas.

Pertanyaan : Apa tujuan NU membuat buku itu ?

Jawab : Supaya ada keadilan di dalam rasa kemanusian yang mana kegelisahan para penyandang disabilitas dengan ibadah sehari-harinya

Pertanyaan : Bagaimana upaya mewujudkanya kesetaraan hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitasdi indonesia melalui No. 8 Tahun 2016 ?

Jawab : Itu harus kita akui bahwa di Indonesia masih belum terpenuhi hak-hak dan terwujudnya kesetaraan mereka terhadap hak-hak merek

Pertanyaan : Apakah buku ini hanya untuk pengikut NU saja ? lalu bagaimana dengan golongan agama lain ?

Jawab : oh gak apa-apa NU itukan hanya organisasi sementara di dalam bahtsul masail dalam bukunya mengandung empat mazhab karena mengandung empat mazhab buku itu dibuat untuk ahli sunnah waljamaah dan tidak kemudian buku itu serta-merta di buat untuk NU saja

Pertanyaan : Apakah buku ini terealisasi dengan baik ?

Jawab : sudah

Pertanyaan : bagaimana pemahaman orang islam pada umumnya memahami isu-isu orang berkebutuhan khusus untuk tidak harus menyebut penyandang cacat karena orang cacat itu tersebut tidak suka di bilang cacat ?

Jawab : Istilah disabilitaskan diganti cacat itu kan pengahalusan jadi pemerintah menganti nya supaya halus saja

II. DOKUMEN

